

# Persepsi dan Protes Masyarakat di Instagram terhadap Issue Kenaikan Tunjangan Anggota DPR di Makassar

## *Public Perceptions And Protests On Instagram Regarding The Increase In Allowances For DPR Members In Makassar*

Rahmat Syah Putra<sup>1</sup>, Anil Hukma<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

\* Email : rahmat.keo@gmail.com

### **Keywords:**

Instagram,  
Public perception,  
Digital protest,  
Sosial media participation,  
DPR members' Allowances

### **ABSTRACT**

*Social media has evolved into a digital public sphere that enables citizens to express opinions, criticism, and participation regarding government policies. One of the issues that has attracted widespread public attention is the policy on increasing the allowances of members of the Indonesian House of Representatives (DPR), which generated diverse public responses, particularly on Instagram. This study aims to analyze public perceptions of the increase in DPR allowances in Makassar and to identify the forms of public participation and protest expressed through Instagram.*

*This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through digital observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling based on their involvement in discussions concerning the DPR allowance issue on Instagram. The collected data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The findings indicate that most participants expressed negative perceptions of the allowance increase policy, arguing that it was inconsistent with the current economic conditions experienced by the public. These perceptions were manifested through various forms of digital participation, including critical comments, content creation, hashtag campaigns, reposting information, and discussions in Instagram comment sections. The study also reveals that Instagram has developed beyond an information-sharing platform into a digital public sphere that facilitates public opinion formation and strengthens citizens' political participation in responding to government policies.*

### **ABSTRAK**

*Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memunculkan beragam respons di media sosial, khususnya Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap isu kenaikan tunjangan anggota DPR di Makassar serta mengidentifikasi bentuk partisipasi dan protes masyarakat yang muncul melalui Instagram.*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam diskusi mengenai isu kenaikan tunjangan anggota*

### **Kata Kunci:**

Persepsi Masyarakat  
Protes Digital  
Partisipasi Media Sosial  
Kenaikantunjangan Dpr

*DPR di Instagram. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Persepsi tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi digital, seperti memberikan komentar kritis, membuat unggahan, menggunakan hashtag, membagikan kembali informasi, serta terlibat dalam diskusi di kolom komentar Instagram. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik digital yang memfasilitasi pembentukan opini publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat dalam memperoleh, menyebarkan, dan mengakses informasi. Kehadiran internet telah melahirkan berbagai platform media sosial yang memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi yang aktif dalam membentuk opini publik (Castells, 2012). Perubahan tersebut menjadikan media sosial berkembang sebagai ruang publik digital yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan partisipasi politik secara lebih terbuka.

Instagram merupakan salah satu media sosial yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Berbagai fitur seperti unggahan foto, video, reels, story, siaran langsung, dan kolom komentar menjadikan Instagram sebagai media komunikasi yang mampu membangun interaksi dua arah antar pengguna. Dalam konteks komunikasi politik, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang diskursus publik yang memungkinkan masyarakat membangun opini kolektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah (Habermas, 1989).

Salah satu isu yang memperoleh perhatian masyarakat adalah kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan tersebut memunculkan berbagai tanggapan karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Informasi mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR tersebar secara luas melalui media massa dan media sosial sehingga memunculkan berbagai bentuk respons berupa komentar, diskusi, penyebaran poster digital, meme politik, hingga protes digital di Instagram. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan persepsi serta membangun narasi kritik terhadap kebijakan publik (Guest et al., 2006).

Dalam perspektif masyarakat jaringan (network society), perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola partisipasi masyarakat dari komunikasi konvensional menuju komunikasi berbasis jaringan digital. Menurut (Castells, 2012), masyarakat modern membangun hubungan sosial melalui jaringan komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi tersebut menyebabkan media sosial memiliki peran strategis dalam pembentukan opini publik, mobilisasi massa, serta penyebaran gerakan sosial digital (Castells, 2012).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial mampu memperkuat partisipasi politik masyarakat melalui aktivitas digital seperti memberikan komentar, membagikan informasi, menggunakan hashtag, serta membangun solidaritas kolektif (Bennett & Segerberg, 2013). Selain itu, penelitian (Guest et al., 2006) menjelaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena komunikasi politik yang mampu membentuk persepsi publik terhadap berbagai isu kebijakan. Sementara itu, (Velasquez et al., 2020) menemukan bahwa konten visual di media sosial memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menarik perhatian masyarakat dibandingkan komunikasi berbasis teks.

Meskipun demikian, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap isu kenaikan tunjangan anggota DPR melalui Instagram, khususnya pada konteks masyarakat Kota Makassar, masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas komunikasi politik secara umum atau gerakan sosial digital tanpa mengkaji hubungan antara persepsi masyarakat, diskursus digital di Instagram, dan demonstrasi fisik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat di Instagram terhadap isu kenaikan tunjangan anggota DPR di Makassar serta mengidentifikasi bentuk partisipasi dan protes masyarakat yang berkembang melalui media sosial.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap isu kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkembang di media sosial Instagram. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan terhadap objek penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dengan fokus pada masyarakat yang aktif menggunakan Instagram dan mengikuti perkembangan isu kenaikan tunjangan anggota DPR. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi pengguna aktif Instagram, mengetahui isu kenaikan tunjangan DPR, serta pernah berinteraksi melalui komentar, unggahan, atau membagikan informasi terkait isu tersebut. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh dan tidak ditemukan informasi baru yang relevan (Guest et al., 2006).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digital dilakukan terhadap unggahan Instagram yang berkaitan dengan isu kenaikan tunjangan DPR, meliputi poster digital, video demonstrasi, Instagram Story, meme politik, hashtag, dan kolom komentar. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih untuk memperoleh informasi mengenai persepsi, pengalaman, dan bentuk partisipasi mereka terhadap isu tersebut. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa tangkapan layar unggahan Instagram, foto, video, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Hine, 2015).

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan

dan verifikasi secara terus-menerus terhadap hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan penelitian yang kredibel (Miles et al., 2014).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penerapan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell & Poth, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Instagram sebagai Ruang Publik Digital dalam Persepsi Masyarakat terhadap Isu Kenaikan Tunjangan DPR

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi digital, penelitian menunjukkan bahwa Instagram dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik digital untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Kecepatan penyebaran informasi, kemudahan berinteraksi, serta tersedianya berbagai fitur komunikasi menjadikan Instagram sebagai media yang efektif dalam membangun opini publik.

Adapun identitas informan dalam penelitian ini disamarkan menggunakan inisial guna menjaga etika penelitian kualitatif:

| No | Inisial | Latar belakang informan                           | Keterangan                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | AR      | Direktur logistic universitas hasanuddin makassar | Pengamat dinamika social dan komunikasi publik |
| 2. | MF      | Mahasiswa universitas islam makassar              | Aktif dalam diskursus protes digital           |
| 3. | RS      | Jurnalis media online makassar                    | Mengamati penyebaran isu di media social       |
| 4. | AN      | Masyarakat kota makassar                          | Pengguna aktif instagram                       |

Informan AR, selaku Direktur Logistik Universitas Hasanuddin yang mengamati dinamika sosial dan komunikasi publik, menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi politik. Menurutnya:

*"Sekarang masyarakat tidak harus turun langsung dulu untuk menyampaikan kritik. Di Instagram orang sudah bisa membangun opini dan memengaruhi masyarakat lain melalui unggahan yang mereka buat."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Instagram telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan politik secara terbuka. Melalui unggahan, komentar, maupun penyebaran ulang informasi, masyarakat dapat membentuk opini publik dan memengaruhi cara pandang pengguna lain terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR. Temuan ini sejalan dengan konsep ruang publik yang dikemukakan oleh (Habermas, 1989), bahwa ruang publik merupakan arena diskusi tempat masyarakat menyampaikan pendapat mengenai persoalan yang menjadi kepentingan bersama.

Pendapat serupa disampaikan oleh Informan MF, mahasiswa Universitas Islam Makassar yang aktif mengikuti perkembangan isu demonstrasi di media sosial. MF menyatakan:

“Instagram jadi tempat paling cepat untuk lihat informasi demo, kritik mahasiswa, sampai ajakan aksi. Biasanya informasi pertama saya lihat dari story teman atau akun kampus.”

Informan RS juga menanggapi hal tersebut

*“konten visual seperti poster digital, infografik, dan video demonstrasi memiliki pengaruh yang besar dalam menarik perhatian masyarakat. Menurut RDS, penyajian informasi dalam bentuk visual membuat pesan lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat lebih cepat memberikan respons terhadap isu yang berkembang. Selain itu, penggunaan hashtag dan unggahan yang dibagikan secara berulang memperluas jangkauan informasi sehingga isu kenaikan tunjangan DPR menjadi pembahasan yang ramai di Instagram.”*

Sementara itu, Informan AN mengungkapkan bahwa

*“partisipasi masyarakat di Instagram tidak selalu diwujudkan melalui pembuatan unggahan sendiri, tetapi juga melalui pemberian komentar, menyukai (like), serta membagikan kembali informasi yang dianggap penting. Menurut AN, aktivitas tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kebijakan publik dan menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Instagram menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan isu kenaikan tunjangan DPR. Informasi tidak hanya diperoleh dari media massa, tetapi juga dari akun kampus, organisasi, dan unggahan pengguna lain yang kemudian disebarluaskan melalui fitur *Instagram Story* dan *repost*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial mempercepat arus informasi sekaligus memperluas ruang diskusi publik mengenai isu-isu politik.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa konten yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan isu kenaikan tunjangan DPR berupa poster digital, video demonstrasi, meme politik, infografik kritik kebijakan, serta penggunaan *hashtag* yang bersifat persuasif. Konten-konten tersebut memudahkan masyarakat memahami isu dan mendorong keterlibatan mereka dalam memberikan komentar maupun membagikan informasi kepada pengguna lain.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram tidak lagi hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, membangun opini, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hasil tersebut mendukung penelitian (Anggraeni Kartodinoto et al., 2024) dan (Velasquez et al., 2020) yang menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu politik.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram telah berkembang menjadi ruang publik digital yang berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, masyarakat memanfaatkan Instagram sebagai media untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mengenai kebijakan tersebut. Informasi mengenai kenaikan tunjangan DPR tersebar melalui berbagai bentuk konten, seperti poster digital, video, infografik, *Instagram Story*, serta kolom komentar yang mendorong terjadinya diskusi publik.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui isu kenaikan tunjangan DPR melalui Instagram. Menurut informan, penyebaran informasi melalui media sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan media konvensional sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan mengikuti perkembangan isu. Selain itu, fitur komentar dan berbagi ulang (repost) memungkinkan pengguna menyampaikan tanggapan secara langsung terhadap informasi yang diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya menjadi media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori ruang publik yang dikemukakan oleh (Habermas, 1989) yang menyatakan bahwa ruang publik merupakan arena komunikasi yang memungkinkan masyarakat berdiskusi mengenai persoalan bersama dan membentuk opini publik. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, ruang publik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi berkembang melalui media sosial yang memungkinkan interaksi berlangsung secara terbuka dan tanpa batas geografis. Sejalan dengan itu, (Castells, 2012) menjelaskan bahwa masyarakat jaringan (network society) memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun jaringan informasi dan memperluas partisipasi dalam berbagai isu sosial maupun politik.

Berdasarkan hasil observasi, bentuk komunikasi yang paling banyak ditemukan pada isu kenaikan tunjangan DPR berupa poster digital, video demonstrasi, meme politik, infografik, dan unggahan Instagram Story. Konten-konten tersebut disusun dengan bahasa yang sederhana, visual yang menarik, dan pesan yang mudah dipahami sehingga mampu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi visual memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian (Velasquez et al., 2020) yang menjelaskan bahwa konten visual pada media sosial memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menarik perhatian pengguna serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik. Selain itu, (Nasrullah, 2017) menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih interaktif melalui penyebaran konten visual, komentar, dan berbagai bentuk komunikasi digital lainnya.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kenaikan tunjangan DPR cenderung didominasi oleh respons kritis. Informan berpendapat bahwa kebijakan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Persepsi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk komentar, unggahan ulang informasi, penggunaan hashtag, serta penyebaran poster digital sebagai bentuk penyampaian aspirasi melalui media sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Anggraeni Kartodinoto et al., 2024) yang menjelaskan bahwa Instagram telah berkembang sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat, khususnya generasi muda, membangun opini dan memberikan respons terhadap berbagai isu politik. Penelitian (Creswell, 2018) juga menunjukkan bahwa interaksi pengguna Instagram melalui komentar, berbagi konten, dan diskusi digital berkontribusi dalam membangun diskusi publik mengenai isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat terhadap isu kenaikan tunjangan DPR terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung di Instagram. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang publik digital yang memungkinkan

masyarakat membangun opini, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam diskursus mengenai kebijakan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa Instagram memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu politik di era komunikasi digital.

### C. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram telah berkembang menjadi ruang publik digital yang berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AR, MF, RS, dan AN, diketahui bahwa masyarakat memanfaatkan Instagram sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi, mengikuti perkembangan isu, serta menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan tersebut. Berbagai fitur Instagram, seperti unggahan foto, video, Instagram Story, Reels, kolom komentar, dan hashtag, dimanfaatkan untuk membangun opini publik dan memperluas penyebaran informasi mengenai isu kenaikan tunjangan DPR.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam merespons isu kenaikan tunjangan DPR tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi secara langsung, tetapi juga berkembang dalam bentuk partisipasi digital. Bentuk partisipasi tersebut meliputi pemberian komentar, membagikan ulang (repost) informasi, penggunaan Instagram Story, penyebaran poster digital, penggunaan hashtag, serta diskusi melalui kolom komentar. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat komunikasi politik, membangun solidaritas digital, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan publik.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat membentuk persepsi, membangun opini, dan berpartisipasi secara aktif dalam diskursus mengenai kebijakan pemerintah. Dengan demikian, media sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu publik di era komunikasi digital serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan proses demokrasi melalui penyampaian aspirasi secara terbuka.

### REFERENSI

- Anggraeni Kartodinoto, S. R., Purnomo, D., & Utomo, A. W. (2024). Analisis Instagram sebagai ruang publik terhadap respon generasi-Z dalam kontestasi Pilpres 2024 (studi pada generasi-Z di Kota Salatiga). *Jurnal Niara*, 17.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>

- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Hine, C. (2015). *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*. Bloomsbury Academic.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2017). BLOGGER DAN DIGITAL WORD OF MOUTH: GETOK TULAR DIGITAL ALA BLOGGER DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2017.16.1.1>
- Velasquez, A., Rojas, H., & Leahy, J. (2020). Political expression on social media: The role of communication and visual content. *New Media & Society*, 22(6), 1057–1075. <https://doi.org/10.1177/1461444819878756>